

Mulawarman Universitas – Samarinda

Kalimantan Timur Menyongsong Desentralisasi: Kondisi & Strategi  
(East Kalimantan Supporting Decentralization: Condition and Strategy)

Decentralization Workshop II  
Strengthening the University Capacity to Support Decentralization  
(Lokakarya Kedua Untuk Meningkatkan Kesanggupan Universitas  
Mendukung Desentralisasi)

Project 497-0357 / 104-000  
Strategic Objective 1  
ECG, USAID/Indonesia  
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)  
University of Maryland at College Park

June 4 – 10, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).  
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of  
USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

**KALIMANTAN TIMUR  
MENYONGSONG DESENTRALISASI  
( Kondisi & Strategi )**

oleh :

Juliansyah  
Zainal Ilmi  
Fitriadi  
Hairul Anwar

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2000**

Akan tetapi yang perlu diingat bahwa wacana-wacana semacam itu ada di Kaltim dan mendapat perhatian yang serius dari masyarakat Kaltim.

Desentralisasi semakin berperan penting jika dihubungkan dengan berbagai tantangan pembangunan yang sedang dihadapi. Perwujudan desentralisasi itu sendiri perlu mempertimbangkan aspek lainnya, yaitu :

1. Hubungannya dengan proses industrialisasi dan globalisasi. Salah satu persyaratan di era globalisasi adalah tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam masyarakat dan organisasi pemerintahan. Dengan demikian Pemda Kaltim dituntut untuk mengambil keputusan yang bertanggung-jawab.
2. Hubungannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Perkembangan yang pesat dalam bidang telekomunikasi dan transportasi memungkinkan mobilitas barang dan jasa serta manusia menjadi sangat tinggi, jarak bukan lagi persoalan.

Dengan demikian jelas bahwa desentralisasi dan pemisahan wilayah memiliki korelasi yang negatif.

3. Hubungannya dengan egalitarianisme dalam masyarakat. Kecenderungan ini akan semakin besar, sehingga ketimpangan kekuasaan dan kesejahteraan bertentangan dengan semangat ini. Desentralisasi adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang egaliter akan tetapi tetap dalam framework negara kesatuan RI.
4. Hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat. Desentralisasi membuat hubungan antara Pemda dan masyarakat semakin dekat sehingga satu sama lain bisa saling menilai dan

memahami potensi yang ada, yang kemudian dapat dikembangkan secara optimal.

Desentralisasi haruslah difahami sebagai proses yang *memperkuat atau saling mendorong*, yaitu bagaimana pembangunan nasional didasarkan atas kemajuan dan kemandirian pembangunan daerah otonom dan bukan sebagai *politik tarik tambang* yaitu adu kekuatan antara pusat dan daerah yang sungguh akan sangat tidak produktif.

Peter F. Drucker menyatakan, *If you don't change you die*. Itulah yang akan terjadi jika kita masih enggan melakukan perubahan.

## PENDAHULUAN

Hampir semua negara dibelahan dunia ini, baik yang menganut sistem federal maupun kesatuan, subsidi oleh pemerintah pusat memegang peranan yang sangat vital dalam kebijakan fiskal pemerintah.

Peranan tersebut terutama dalam :

- Alokasi
- Distribusi
- Stabilisasi
- Pertumbuhan

Peran subsidi oleh pemerintah pusat menjadi semakin penting jika mengingat bahwa sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah masih sangat terbatas. Sementara sumber pendapatan dari pajak yang bersifat lukratif masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sehingga apabila pemerintah daerah diberikan tanggung-jawab yang lebih besar, maka subsidi adalah sumber pembiayaan utama untuk menjalankan tanggung-jawab tersebut.

Pencapaian yang optimal sebagai akibat dari penjabaran peran penting dari subsidi diatas, maka subsidi yang diberikan harus diikuti oleh prinsip :

- Efisien secara ekonomi,
- Adanya suatu keseimbangan,
- Pengelolaan/manajemen yang memadai.

Dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka harus diberikan ruang gerak yang cukup bagi daerah untuk mengambil inisiatif atau

langkah-langkah yang dianggap perlu. Kemudian pemerintah pusat harus pula melakukan mekanisme kontrol yang memadai dan logis.

Akan tetapi topik pembicaraan mengenai alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali bukanlah topik yang mudah untuk dibicarakan. Ada berbagai kekuatan dan kepentingan yang saling tarik-menarik. Akibatnya timbul berbagai kecurigaan, tawar-menawar, dsb, yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Masyarakat Propinsi Kalimantan Timur dalam menyikapi UU No. 22 dan UU No. 25, juga tidak terlepas dari unsur-unsur tadi. Terdapat pro dan kontra, yang kemudian bermuara pada tuntutan pembentukan negara federal, pengambil-alihan berbagai perusahaan swasta yang ada menjadi milik daerah, dll.

Adanya pro dan kontra serta berbagai tuntutan tersebut harus difahami sebagai dinamika dalam wacana demokrasi, juga dapat dipandang sebagai kecemburuan dan rasa frustrasi yang berkepanjangan dari masyarakat di daerah.

Sebagai salah satu daerah yang menyumbang devisa sangat besar bagi pemerintah pusat, akan tetapi tidak mendapatkan perhatian, pembagian, dan pembangunan yang memadai ditambah lagi dengan ketimpangan perekonomian dimasyarakat, maka tuntutan itu terasa wajar. Akan tetapi jika tidak segera mendapat tanggapan ataupun penjelasan yang cukup dan masuk akal, dampak selanjutnya bisa berakibat fatal, yaitu timbulnya keinginan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.

## KONDISI SOSIAL EKONOMI

### SUMBER DAYA ALAM

Jika berbicara mengenai Propinsi Kalimantan Timur, maka segera terbayang suatu kawasan hutan tropis yang sedemikian besar dengan beberapa bagian yang gundul dan berlubang sebagai akibat kegiatan pertambangan, lapangan dan kilang minyak yang tiap hari terus mengucurkan minyak akan tetapi banyak daerah di Kaltim yang mengalami kelangkaan minyak, jika tersedia maka dengan harga yang sangat tinggi.

Berikut ringkasan kondisi Kalimantan Timur saat ini :

Luas Areal	:	211.440 Km <sup>2</sup>
Areal Hutan	:	118.862 km <sup>2</sup> (56 %)
Areal Pertanian	:	10.447 km <sup>2</sup> (4,9 %)
Areal Pemukiman	:	2.043 Km <sup>2</sup> (0,9 %)
Jumlah Penduduk	:	2.601.571 jiwa
Kepadatan	:	11 jiwa/Km <sup>2</sup>
Laju Pertumbuhan	:	4,7 %/tahun (99)
Angkatan Kerja	:	989.573 jiwa
Karakteristik	:	< SD : 57,4 %
	:	< SLTP : 13,73 %
	:	< SLTA : 22,93 %
	:	SARJANA ; 4,99 %

Angka-angka diatas menunjukkan dengan jelas ketimpangan luas wilayah dengan jumlah penduduk.

Kemudian jika dilihat dari karakteristik angkatan kerja, jelas terlihat dominasi dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, sementara angkatan kerja dengan pendidikan/lulusan perguruan tinggi masih sangat sedikit yakni kurang dari 5 %. Kesimpulan yang bisa ditarik dari hal ini adalah bahwa terdapat ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Jika dilihat dari proses pembangunan selama lebih dari 30 tahun ini, maka angka angkatan kerja dengan dominasi mereka yang tingkat pendidikannya sedemikian rendah (lebih dari 50 %) menunjukkan bahwa kontribusi kekayaan alam Kaltim kepada nasional tidak diimbangi dengan kemajuan yang nyata bagi masyarakat Kaltim itu sendiri. Atau dengan kata lain, dengan jumlah penduduk yang sedikit-sebaliknya kekayaan alam yang dimiliki sedemikian besar disetorkan kepada pusat-adalah sangat kontras dan menyedihkan.

Berikut data singkat mengenai sumber daya Kaltim :

*Sumber Daya Alam Energi* : US \$ 6,6 milyar

*Sumber Daya Alam Non Energi* : US \$ 5,4 milyar

**Total** : **US \$ 12,0 milyar**

*(nilai jual per tahun, belum termasuk beberapa lapangan besar lainnya)*

Periode 1966-1998, cadangan migas yang ditemukan 29,8 milyar ekuivalen barel, yang telah diproduksi 20,1 milyar ekuivalen barel. Sehingga, cadangan yang tersisa adalah sebesar 9,7 milyar ekuivalen barel atau setara dengan 15,4 tahun lagi. Dengan demikian jika tidak ditemukan cadangan minyak baru maka dalam 15,4 tahun cadangan yang telah ditemukan tersebut akan habis.

Angka-angka diatas dipaparkan tidak dimaksudkan untuk membanggakan diri ataupun menyombongkan diri. Akan tetapi lebih sebagai ilustrasi pendukung saja.

Dr. Deming Chides, pernah bertanya kepada audiensnya,

***“ Apakah kita yang memiliki sumber daya alam yang sedemikian besar ini telah diberkahi oleh Yang Maha Kuasa ? ”***

***“ Salah, sebenarnya kita bahkan telah dikutuk dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah tersebut ”.***

Dengan ilustrasi diatas ingin digambarkan demikianlah perasaan sebagian masyarakat Kaltim dewasa ini. Perasaan yang kemudian melahirkan sebuah paradigma baru, yaitu ***“ tolong jangan katakan kami kaya dengan apa yang kami miliki sekarang, tapi bantu kami untuk menjaga dan melestarikannya. Yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada didaerah kami ”.***

## **INDIKATOR EKONOMI**

Indikator pertumbuhan ekonomi Kaltim adalah sebagai berikut :

a. Tahun 1998

- PDRB : Rp 53,48 triliun
- Pertumbuhan Ekonomi : - 0,89 %
- Pendapatan Per Kapita : Rp 21,52 juta
- Laju Inflasi : 71,38 %

b. Tahun 1999

- PDRB : Rp 56,75 triliun
- Pertumbuhan Ekonomi : 4,46 %
- Pendapatan Per Kapita : Rp 21,81 juta
- Laju Inflasi : 3,38 %

c. Tahun 2000 (prediksi)

- PDRB : Rp 62,40 triliun
- Pertumbuhan Ekonomi : 5,72 %
- Pendapatan Per Kapita : Rp 22,26 juta
- Laju Inflasi : 8,0 %

*(BPS Kaltim)*

## INVESTASI

Sampai dengan Maret 2000, investasi di Kaltim adalah sbb :

- Rencana PMDN sebanyak 409 proyek dengan nilai investasi Rp 22,53 triliun. Sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 274 proyek dengan nilai investasi Rp 9,40 triliun atau sama dengan 41,72 %.
- Rencana PMA sebanyak 75 proyek dengan nilai investasi sebesar US \$ 6,41 milyar. Sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 44 proyek dengan nilai investasi sebesar US \$ 2,54 milyar atau 39,56 %.

## SITUASI & KONDISI

### PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Beberapa kabupaten di Kaltim telah dimekarkan menjadi beberapa kabupaten dan kota. Pemekaran ini dilakukan berdasarkan aspirasi dari masyarakat setempat.

Proses pemekaran dengan segala konsekuensinya belum lagi selesai, telah ada tuntutan baru, yaitu pembentukan propinsi Kalimantan Utara.

Tuntutan ini dilakukan dengan alasan bahwa daerah utara Kaltim yang berbâatasan langsung dengan Malaysia kurang mendapat perhatian. Sehingga jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain di Kaltim.

*Berikut tabel daerah yang dimekarkan*

KAB. SEBELUM PEMEKARAN	KAB. SETELAH PEMEKARAN
Kabupaten Kutai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabupaten Kutai Barat</li> <li>▪ Kabupaten Kutai Timur</li> <li>▪ Kabupaten Kutai</li> <li>▪ Kota Bontang</li> </ul>
Kabupaten Bulungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabupaten Tanah Tidung</li> <li>▪ Kabupaten Nunukan</li> <li>▪ Kabupaten Bulungan</li> </ul>

Daerah yang menurut rencana akan menjadi Propinsi Kalimantan Utara

PROPINSI	KABUPATEN / KOTA
Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabupaten Tanah Tidung</li> <li>▪ Kabupaten Nunukan</li> <li>▪ Kabupaten Bulungan</li> <li>▪ Kabupaten Berau</li> <li>▪ Kotamadya Tarakan</li> </ul>

Adanya pemekaran wilayah tersebut diatas membawa berbagai konsekuensi maupun dampak baik bagi daerah yang baru dimekarkan khususnya dan Kaltim pada umumnya.

Permasalahan tersebut antara lain menyangkut :

- Personel

Pemekaran wilayah menuntut tersedianya personel yang cukup untuk daerah-daerah yang baru dimekarkan tanpa mengganggu daerah lainnya.

Semakin mengkristalnya semangat kedaerahan, dalam bentuk paradigma putra daerah harus diutamakan tanpa melihat kemampuan yang objektif.

Akibatnya timbul pertentangan-pertentangan yang menjurus kearah anarkis dan perpecahan.

- Perlengkapan

Daerah yang baru dimekarkan, terutama yang berada dipedalaman dalam kondisi yang sangat memperhatikan jika dilihat dari segi perlengkapan yang dimiliki. Bahkan ada daerah yang betul-betul memulai dari nol, maksudnya tanpa memiliki sarana dan prasarana yang memadai bahkan terkesan dipaksakan untuk menjadi kabupaten baru.

- Pembiayaan

Kabupaten/kota hasil pemekaran dari segi pembiayaan juga dalam kondisi yang serba kekurangan, serta dalam kondisi yang serba-salah.

Rata-rata mereka disubsidi antara 2 s/d 3 milyar oleh kabupaten induk. Melihat kekurangan yang ada terutama dari segi sarana dan prasarana (perlengkapan), maka adalah sangat sulit untuk

menjalankan roda pemerintahan secara normal dan layak. Sedangkan mereka belum bisa melaksanakan haknya dalam hal mengelola sumber-sumber keuangan yang ada didaerahnya masing-masing sebagaimana yang tertera dalam UU No. 22 dan UU No. 25.

Pokok permasalahannya adalah belum adanya kepala daerah yang definitif sebelum adanya pemilu lokal untuk memilih DPRD II bagi tiap-tiap kabupaten/kota hasil pemekaran. Sehingga berbagai kewenangan yang tertera pada kedua UU diatas secara otomatis juga belum bisa dilaksanakan.

Janji-janji muluk dan angin segar otonomi daerah telah membawa perubahan pada jajaran DPRD dan Pemda di Kaltim. Akan tetapi terkesan "kebablasan", sehingga malah menciptakan kondisi baru yang semakin runyam.

Legislatif seringkali melakukan overlapping dengan eksekutif. DPRD dengan gampang menyetujui tuntutan-tuntutan yang ada di masyarakat tanpa memperhitungkan kemampuan riil daerah (baca - Pemda).

Kemudian dilakukan pemanggilan terhadap beberapa perusahaan swasta besar yang ada di Kaltim, dengan tujuan agar mereka lebih memberikan kontribusi kepada masyarakat Kaltim secara konkrit. Tujuan pemanggilan yang lain adalah agar perusahaan swasta besar tadi mau melakukan divestasi. Akan tetapi sangat disayangkan permintaan untuk melakukan divestasi tadi dilakukan dengan cara-cara yang tidak rasional, yaitu dengan ancaman untuk menggerakkan "people power".

Dijajaran Pemda sendiri, perubahan paradigma baru pada tahap retorika. Belum ada tindakan ataupun kebijakan yang nyata kearah perbaikan yang cukup signifikan.

Kota-kota di Kaltim mengalami apa yang disebut 'mismanagement'. Pemda belum mampu untuk menyediakan hal-hal yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, seperti air bersih, listrik, jalan, dll.

Peruntukan wilayah yang sesuai dengan tata ruang wilayah juga belum bisa dijalankan dengan baik, akibatnya pembangunan yang tidak seimbang bahkan cenderung diskriminatif.

## **KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN TIMUR MENYONGSONG DESENTRALISASI**

Penyelenggaraan pemerintah daerah serta perimbangan keuangan pusat-daerah yang telah diatur dalam UU No. 22 dan UU No. 25, secara efektif akan dilaksanakan pada Mei 2001 yang akan datang. Kedua UU ini merupakan jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan secara sentralistik yang relatif belum mampu mengakomodir berbagai aspirasi daerah. Dengan demikian akan ada kecenderungan pelayanan publik berpindah dari pemerintah pusat kepada pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat (Sidik, 1999).

Dengan telah diundangkannya kedua UU tersebut juga telah membawa perubahan mendasar dalam pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sebagai konsekwensi logis, perlu dilakukan penataan terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah itu sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan azas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di Kabupaten/Kota, sedangkan tugas perbantuan dapat dilaksanakan di Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.

Secara teoritis ada beberapa faktor utama yang membentuk pemerintah daerah, yaitu :

1. Adanya urusan sebagai dasar kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing.

2. Adanya kelembagaan sebagai wadah untuk segala urusan/kewenangan yang diserahkan kepada daerah.
3. Adanya personil yang akan menjalankan pelimpahan kewenangan tersebut.
4. Adanya sumber-sumber pendanaan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan.
5. Adanya unsur wakil-wakil rakyat yang telah mendapat legitimasi dari masyarakat yang akan memimpin pelaksanaan kewenangan.
6. Adanya manajemen yang akan mengelola sehingga penyelenggaraan kewenangan dapat dijalankan secara efektif, ekonomis dan accountable.

Adanya ke-6 faktor tersebut harus selalu mendapat perhatian untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Sehingga penataan pemerintah daerah haruslah secara terpadu dan menyeluruh, tidak boleh secara sepotong-sepotong.

Pada dasarnya otonomi diberlakukan dengan harapan agar kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dengan lebih baik, dalam artian efektif (tepat sasaran) dan ekonomis. Oleh karena itu otonomi luas diberikan kepada Kabupaten/Kota, karena merekalah yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengenal dan mengetahui kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Propinsi Kalimantan Timur sebagai propinsi terluas kedua setelah Papua, mengalami kendala yang sangat klasik didalam membangun daerahnya akan tetapi kendala tersebut sampai sekarang masih belum mampu terpecahkan. Belum tersedianya infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi yang memadai, menyebabkan masih banyak daerah yang terisolir dan

sangat sulit untuk dijangkau padahal daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, lebih jauh lagi membuat para investor berpikir lebih jauh sebelum menanamkan modalnya di Kaltim.

Diutara Kaltim yang berbatasan langsung dengan Malaysia, juga menghadapi kendala yang tidak sedikit. Kurangnya sarana transportasi menyebabkan harga barang kebutuhan menjadi sangat tinggi. Kemudian secara ekonomi berubah menjadi ketergantungan terhadap pasokan dari Malaysia. Pengawasan terhadap daerah perbatasan menjadi sulit sehingga pencurian kayu merajalela. Dampak lanjutan adalah menurunnya 'sense of nationality' penduduk setempat. Sehingga tidaklah mengherankan jika ada tuntutan untuk membuat propinsi tersendiri, bahkan kemudian ada beberapa suara yang menginginkan untuk bergabung dengan negara tetangga.

Dengan adanya pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka membawa konsekuensi terhadap Kalimantan Timur, antara lain dengan :

#### **Bidang Kepegawaian**

Dibidang kepegawaian ini Pemda harus berani melakukan perampingan dinas dan pegawai. Yang dimaksudkan yaitu suatu struktur pemerintahan yang ramping akan tetapi kaya akan fungsi.

Perampingan jumlah pegawai memang akan terasa sangat berat dan pahit, akan tetapi harus dilakukan mengingat jumlah pegawai yang banyak tanpa tugas dan pekerjaan yang jelas tentu saja hanya memberatkan keuangan Pemda.

Penunjukan personil yang akan menduduki suatu jabatan juga harus mempertimbangkan banyak hal tidak hanya mempertimbangkan senioritas dan eselon, akan tetapi lebih kepada 'core competence'.

### **Bidang Ekonomi**

Dibidang perekonomian Pemda harus bekerja lebih keras untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sebagaimana diketahui, kemampuan keuangan Pemda yang berasal dari PAD adalah sangat kecil, sehingga untuk membiayai pembangunan sudah tentu tidak mencukupi. Sedangkan sumber pembiayaan yang berasal dari pajak-pajak yang lukratif masih dikontrol oleh pemerintah pusat. Sehingga kemampuan dan kreativitas Pemda untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru tanpa merusak tatanan perekonomian merupakan salah satu faktor yang dominan.

Bagi Kaltim salah satu poin yang cukup krusial adalah bagaimana *pembagian hasil sumber daya alam*. Mengingat Kaltim dengan potensi SDA yang melimpah akan tetapi dalam keadaan yang kurang dalam hal infrastruktur, padahal infrastruktur adalah salah satu syarat mutlak jika ingin bersaing untuk merebut investor.

Memang jika melihat potensi ekonomi terutama yang berasal dari SDA maka Kaltim akan menikmati pembagian keuangan yang cukup besar, akan tetapi jika melihat bahwa otonomi berada di tingkat kabupaten/kota persoalan bisa menjadi lain. Tidak semua kabupaten/kota di Kaltim memiliki SDA yang melimpah, jadi persoalan didalam propinsi sendiri bukanlah persoalan yang kecil.

### **Bidang Pembangunan**

Harus ada perubahan paradigma secara menyeluruh dalam bidang ini, karena selama kurun waktu praktek pembangunan yang sentralistik Pemda hanya melaksanakan pembangunan yang di instruksikan dari pusat. Sebagai akibatnya Pemda

kekurangan inisiatif dan sering dituduh tidak kreatif bahkan malas.

Dilain pihak, Pemda juga mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah disebabkan kurangnya kesempatan ataupun kepercayaan kepada mereka untuk berinisiatif serta menjalankan inisiatif tersebut.

Konflik semacam ini menimbulkan ketidakpercayaan dari kedua belah pihak. Pusat mengatakan bahwa Pemda belum siap atau belum mampu untuk diserahi tanggung jawab, dilain pihak Pemda mengatakan bahwa kami mampu kalau kami memang diberikan kesempatan.

Dengan demikian UU No. 22 dan UU NO. 25 adalah sarana untuk memperbaiki itu semua. Karena kedua UU tersebut telah memuat fungsi-fungsi :

- Pemerintah pusat berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara, sehingga pemerintah pusat lebih pada penetapan pedoman, standar, kriteria dan kebijakan umum.
- Pemerintah propinsi berfungsi sebagai pembina dan pengawas atas pelaksanaan pemerintahan kabupaten dan kota dalam kerangka asas dekonsentrasi.
- Pemerintahan kabupaten dan kota berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengatur dan pengendali segala aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan telah adanya pembagian fungsi tersebut seyogyanya semua konflik yang telah disebutkan diatas dapat diatasi.

**Bidang Penggunaan Sumber Daya Alam**

Sebagaimana telah disebutkan diatas, Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah. Perlu juga diketahui bahwa SDA tersebut selama puluhan tahun telah diambil untuk membiayai pembangunan di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan otonomi, maka Kaltim harus mampu mengelola potensi SDA tersebut sehingga tetap lestari. Sesuai dengan motto "*Pembangunan yang Berbasis Sumber Daya Alam Lestari*". Dengan demikian SDA tadi bisa dipergunakan untuk jangka waktu selama mungkin.

**Bidang Kependudukan**

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah di Kaltim adalah sangat tidak seimbang. Perlu juga dikemukakan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kaltim pada tahun 1998 adalah 2,54 %, tahun 1999 sebesar 4,7 % dan pada tahun 2000 diperkirakan sebesar 7,1 %. Laju pertumbuhan tersebut sebagian besar disebabkan oleh migrasi penduduk dari luar Kaltim.

Jika benar pada saat otonomi diberlakukan nantinya Kaltim '*panen uang*' maka angka migrasi diperkirakan menjadi semakin besar, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif kearah itu.

**Bidang Pengawasan**

Bidang ini sangat penting dan perlu mendapat perhatian serius. Pengawasan yang dimaksudkan adalah pengawasan dibidang keuangan daerah.

Pengawasan perlu dilakukan agar berbagai kebocoran dalam menangani berbagai proyek Pemda bisa ditekan seminim mungkin.

Berbagai pengeluaran yang tidak perlu juga harus diminimalkan. Jajaran Pemda benar-benar harus selektif didalam melakukan perjalanan dinas, dll.

**Bidang Perencanaan**

Perencanaan pembangunan didaerah harus betul-betul memperhatikan kebutuhan dan prioritas daerah. Hal ini akan sangat berbeda dengan praktek terdahulu, dimana banyak proyek yang dibuat oleh pusat didaerah, sehingga belum tentu sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah itu sendiri.

**Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah salah satu komponen mendasar dalam usaha mensukseskan program-program pembangunan di daerah.

Menyadari hal ini, Pemda Kaltim telah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan berbagai kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada ditanah air.

SDA yang ada tidak akan berarti banyak, mengingat apa yang diatur/dibagi dalam UU No. 25 adalah non renewable resouces. Artinya dalam jangka panjang tidak bisa diandalkan. Hal lain mengandalkan kekayaan SDA juga riskan karena harga produk-produk SDA sendiri sangat fluktuatif.

**Dll.**

Secara singkat dapat dikatakan bagi Pemda Kaltim perubahan paradigma dalam framework otonomi dan reformasi merupakan suatu keharusan.

Isu mendasar adalah bagaimana mencegah terciptanya '*raja-raja kecil*'. Karena kemungkinan untuk itu cukup terbuka, apalagi jika terjadi kolusi antara eksekutif dan legislatif.

Cara terbaik adalah menentukan prioritas-prioritas dari berbagai agenda pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten/kota yang notabene lebih mengetahui dan menguasai keadaan daerah masing-masing harus lebih mampu menentukan prioritas mana yang menjadi kepentingan utama bagi daerahnya.

Wd 15/01/2001

## STRATEGI IMPLEMENTASI

Dari uraian-uraian diatas, Kaltim perlu menetapkan suatu *grand strategy* dalam kerangka otonomi yang kemudian diimplementasikan kedalam masing-masing sektor pembangunan didaerah.

Grand Strategy dari Kaltim adalah :

- *Bekerja dengan ekonomi global.*
- *Investasi dalam bentuk sumber daya manusia.*
- *Bangun infrastruktur.*
- *Jaga lingkungan.*
- *Mendayagunakan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sosial budaya secara lestari.*

Grand strategy tersebut kemudian diterjemahkan kedalam strategi-strategi sbb :

### **Strategi Jangka Pendek**

- *Penataan Kelembagaan*

Penataan kelembagaan Pemda adalah merupakan salah satu syarat untuk berhsilnya pelaksanaan otonomi di Kaltim. Penataan termasuk, fungsi, wewenang/tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas dan nyata yang dilengkapi dengan berbagai peraturan daerah yang mengaturnya.

Dengan demikian diharapkan terbentuk lembaga-lembaga baru yang lebih efektif, ataupun penghapusan lembaga-lembaga yang sudah ada akan tetapi kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.

▪ *Restrukturisasi Keuangan Daerah*

Pemda berani melakukan terobosan dengan cara melakukan 'short cut' terhadap beberapa mata anggaran belanja daerah yang selama ini dianggap sebagai stimulus fiskal, tetapi ternyata tidak efisien dan berpotensi bocor.

▪ *Pengembangan Infrastruktur*

Masih banyak daerah di Kaltim yang terisolir sehingga sangat sulit untuk dijangkau atau dihubungi. Untuk itu penting untuk segera membangun infrastruktur fisik serta fasilitas perhubungan untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Tersedianya infrastruktur fisik dan fasilitas penunjang lainnya praktis dapat mendorong percepatan daya tarik investor nasional dan asing untuk menanamkan modalnya. Kemudian adanya infrastruktur yang memadai akan membawa dampak bagi terbukanya lapangan kerja baru, merangsang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

▪ *Pemulihan Sektor Riil*

Pemda harus cepat melakukan langkah-langkah akselerasi insentif (deregulasi kebijakan daerah) untuk menstimulus sektor produksi dengan cara memperbesar dana kapitalisasi BPD Kaltim, kemudahan dalam penyaluran kredit perbankan serta ketepatan dalam memilih sasaran sektor usaha termasuk optimalisasi perusda.

▪ *Peningkatan SDM – Pendidikan (Diploma)*

Pengembangan SDM adalah bersifat mutlak, Kaltim memulainya dari tingkat diploma. Tenaga pada tingkat ini sangat diperlukan untuk segera mengisi bidang pekerjaan yang ada di Kaltim.

Disamping itu, jika tenaga pada tingkat diploma telah mendapat pekerjaan maka mereka dapat melanjutkan pendidikannya tanpa terlalu banyak membebani Pemda (subsidi), kemudian ada penghasilan yang kemudian dapat bermanfaat dari sektor pajak.

▪ *Divestasi*

Bagi swasta asing besar yang berada di Kaltim pada saatnya dikenakan divestasi. Banyak kasus di Kaltim belakangan ini yang menyangkut perselisihan antara swasta tadi dengan masyarakat sekitar, terutama karena kurangnya 'sense of belonging' dari masyarakat tersebut.

Masyarakat sekitar hanya menjadi penonton bahkan, harus menanggung dampak negatif dari beroperasinya perusahaan disekitar mereka. Dengan adanya kebijakan divestasi maka masyarakat sekitar akan merasakan dampak positif bagi daerah mereka, dan bagi Pemda tentu merupakan salah satu sumber keuangan yang cukup besar.

▪ *Pembenahan Fasilitas Umum*

Salah satu argumen dari pelaksanaan desentralisasi adalah kedekatan Pemda dengan masyarakat sehingga lebih memahami apa yang benar-benar menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian maka berbagai fasilitas umum yang selama ini sangat sulit untuk dipenuhi oleh Pemda dapat segera teratasi. Sangatlah aneh jika saat ini di Samarinda saja sebagai ibukota propinsi Kaltim masih ribuan orang yang belum menikmati air bersih misalnya.

□ **Strategi Jangka Menengah**

- *Perencanaan dan Pengawasan*
- *Peningkatan SDM – Pendidikan (Dasar & Tinggi)*
- *Restrukturisasi Personil*
- *Pengembangan Pertanian Skala Luas*
- *Re-negosiasi Kontrak Swasta*
- *Pengembangan Infrastruktur Lanjutan*

□ **Strategi Jangka Panjang**

- *SDM Setaraf Regional - ASEAN*
- *Industri Berbasis Ilmu Pengetahuan & Teknologi*

## PENUTUP

Berdasarkan SK DPRD Kaltim No. 28/1999, pada dasarnya ada 3 (tiga) tuntutan yang diajukan kepada pusat, yaitu :

1. Pengelolaan SDA seluruhnya diserahkan kepada daerah.
2. BUMN/swasta nasional diserahkan kepada daerah dalam waktu sesingkat-singkatnya.
3. Pembentukan negara federal.

Kemudian BAPPEDA Kaltim dalam KONASBANG tanggal 16 November 1999, mengajukan usul kepada pusat bahwa pembagian keuangan pusat daerah adalah 75 % untuk daerah : 25 % untuk pusat.

Banyak pertanyaan yang kemudian berkembang, diantaranya :

1. Apakah tuntutan tersebut rasional ditengah kondisi bangsa yang tengah terpuruk ?
2. Bagaimana dengan perimbangan keuangan horizontal antar daerah ?
3. Apakah dengan pola 75 : 25 tersebut akan menjamin peningkatan kesejahteraan. Bagaimana dengan kemungkinan munculnya raja-raja kecil (centre class) ?
4. Masih banyak pertanyaan lainnya.

Tuntutan dan pertanyaan diatas adalah potret kegamangan Kaltim didalam melaksanakan desentralisasi. Pro dan kontra yang segera merebak kemudian adalah suatu kenyataan lain.

memahami potensi yang ada, yang kemudian dapat dikembangkan secara optimal.

Desentralisasi haruslah difahami sebagai proses yang *memperkuat atau saling mendorong*, yaitu bagaimana pembangunan nasional didasarkan atas kemajuan dan kemandirian pembangunan daerah otonom dan bukan sebagai *politik tarik tambang* yaitu adu kekuatan antara pusat dan daerah yang sungguh akan sangat tidak produktif.

Peter F. Drucker menyatakan, *If you don't change you die*. Itulah yang akan terjadi jika kita masih enggan melakukan perubahan.